

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM, BUMN, INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: RDP
Sifat Rapat	: Terbuka
Rapat ke	: 16 (enam belas)
Hari/Tanggal	: Rabu, 15 April 2015
W a k t u	: Pukul 21.00 s.d. 00.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	: Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PAN) didampingi : 1. Dodi Reza Alex Nurdin, Lic.Econ, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) 2. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PGERINDRA) 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD) 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	: Membahas Kinerja PT. Pupuk Indonesia (Persero).
Hadir	: 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR-RI 1. Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN. 2. Dirut PT. Pupuk Indonesia (Persero) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dibuka pada pukul 21.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP hari ini, Rabu, 15 April 2015 dalam rangka pembahasan kinerja PT. Pupuk Indonesia (Persero).

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk memberikan paparan.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mendukung PT Pupuk Indonesia (Persero) memenuhi kebutuhan pupuk nasional guna mewujudkan program swasembada pangan.
2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pupuk nasional, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah memberikan jaminan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pabrik pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero).
3. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah dan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi dan mengefektifkan fungsi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI melakukan koordinasi dengan menteri terkait agar Pemerintah segera melunasi kewajiban hutang PSO kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 00.30 WIB

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

IR. H. ACHMAD HAFIZ TOHIR
A-465